

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana atau pembahasan politik yang banyak dibicarakan orang, aktivis, politisi ataupun akademisi, melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan ini, misalnya Islam dan demokrasi, demokratisasi pendidikan Islam dan sebagainya.¹

Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar Islam, pada sisi yang lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun, tentu saja, amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin penting dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah menelaah buku-buku yang temanya saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya.²

Untuk menyebut sebagian diantara jajaran pemikir masa itu yang juga meletakkan dasar-dasar dari pengertian demokrasi. Dalam perkembangannya kemudian, pertumbuhan demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah modern pada masa pencerahan kembali (*renaissance*). Dalam masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau

¹Rohmah Iftitah, "Islam dan demokrasi" , Islamuna, Vol, 1, No, 1, (2014), 35.

²Hartono "Konsep Demokrasi Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid", Jurnal Al-Rabwah, Vol, 13, No, 1, (2019), 1.

negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain. Yaitu pemikiran baru dan mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469-1527), serta pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques Rousseau (1712- 1778).³

Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut telah memberikan sumbangan yang penting bagi pendefinisian kembali demokrasi. Hal yang bisa telusuri dari berbagai studi penelusuran demokrasi adalah bahwa demokrasi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit demokrasi didefinisikan kembali. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan yang menjadi kriteria pertama Pericles oleh model perwakilan. Salah satu tokoh Islam yang membahas tentang demokrasi adalah KH. Abdurrahman Wahid.⁴

Sebelum menjadi Presiden, KH. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan non-sektarian; memberikan kebebasan kepada semua agama hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan. Sejak KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang tertutup dan demokratis di gedung MPR/DPR, Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarno Putri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya, KH. Abdurrahman Wahid meraih dukungan 373 suara dan Megawati meraih 313 suara. Lima suara menyatakan abstain.⁵

Sejak KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ia telah melakukan banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan

³Abdul Muchit Fajar dan Hotrun Siregar, MSi, "*Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi di Indonesia*", Vol, 3 No, 1, (2021), 357.

⁴Henry Subiakto, "*Komunikasi Politik Media Dan Demokrasi*", (Jakarta: Kencana prenatal media grup, 2012), 23.

⁵A. Muhaimin Iskandar, "*Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*," Malang 2010, 35.

militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. KH. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam Liberal yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.⁶

Demokrasi merupakan salah satu perjuangan dan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruluhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama dalam membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.⁷

Ide konsep demokrasi KH. Abdurrahman Wahid ini muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai alternatif bukannya sebagai inspirasi bagi kehidupan bermasyarakat. Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari'ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan rule of law, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi KH. Abdurrahman Wahid menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau "kedaulatan Tuhan" atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya al-Din al-Rais.⁸

⁶Ali Mustajab, "*Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia*", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol, 5 No. 1, (2015), 159.

⁷Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*", (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 156.

⁸Abdurrahman Wahid, "*Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*," Jakarta: PT. Grasindo, Anggota Ikapi 1999, 145.

Nama KH. Abdurrahman Wahid (KH. Abdurrahman Wahid) diakui atau tidak merupakan salah satu sosok intelektual yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan di kancah politik nasional, hal ini dikarenakan salah satu concern pemikiran politiknya adalah tentang demokrasi. Aksi pemikiran dan gerakan sosial yang selama ini dimainkannya tidak pernah bergeser dari gagasan besarnya untuk menciptakan demokratisasi dalam masyarakat. Penerimaan konsep demokrasi menurutnya merupakan pilihan logis sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam.⁹

Gagasannya tentang demokrasi sebenarnya sudah muncul sejak Orde Baru berkuasa, lahirnya lembaga-lembaga demokrasi pada era Orde Baru yang keberadaannya diakui olehnya sebagai mekanisme demokrasi merupakan indikasi penerimaannya terhadap konsep demokrasi. Namun, kemudian ia menempatkan demokrasi institusional ini sebagai kritik dengan istilah yang ia lontarkan sebagai “demokrasi seolah-olah”. Baginya, demokrasi ala Orde Baru terjebak pada institusi dan prosedur politik. Artinya, institusi dan prosedur yang semestinya ditempatkan sebagai mekanisme demokratis ternyata menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri.¹⁰

Hal inilah yang menjadi dasar kritiknya, yakni sebuah situasi, dimana lembaga demokrasi bahkan menjadi penghambat aspirasi atau hak demokratis. Jadi, bukan hanya lembaga-lembaga tersebut kurang berfungsi sebagai penyalur kedaulatan rakyat, ia bahkan menghambat kedaulatan tersebut, karena memposisikan diri sebagai ruang sah bagi demokrasi. Situasi seperti ini tentu mencederai hakikat demokrasi, karena eksistensi lembaga politik yang sebenarnya terposisi sebagai media perwakilan. Dari kritik atas keterjebakan institusional ini, ia kemudian menambatkan solusi praksisnya pada konstitusi. Hal ini lahir dari kesadaran diskursif, bahwa selain lembaga politik, demokrasi juga terbentuk oleh konstitusi. Bahkan konstitusilah yang menjadi landasan normatif bagi demokrasi. Inilah yang merupakan landasan dasar pemahaman dan pemikirannya tentang demokrasi.¹¹

Pemikiran demokrasi KH. Abdurrahman Wahid beranjak dari nalar pribumisasi (berpikir melalui akar pribumisasi) Nalar

⁹Abdurrahman Wahid, “*Tuhan Tidak Perlu Dibela,*” (Cet.V., Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), 20.

¹⁰ Hartono, “*Konsep Demokrasi Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid*” Jurnal Al-Rabwah, Vol. XIII, No. 1, (2019), 5.

¹¹Hisanori Kato, “*Islam Di Mata Orang Jepang: Ulil, K Abdurrahman Wahid, sampai Basyir*”, (Jakarta: Kompas 2014), 159.

inilah yang menjadi landasan berfikir dari segala pembacaan KH. Abdurrahman Wahid terhadap realitas dan berbagai pemikiran dari “luar pribumi”. Hal ini terlihat dari penolakan KH. Abdurrahman Wahid terhadap konsep demokrasi prosedural atau dikenal dengan istilah “demokrasi seolah-olah” yakni sebuah situasi dimana demokrasi telah terjebak dalam institusionalisme politik tetapi minus pemberian hak warga negara yang dijamin oleh nilai-nilai demokrasi. Dan sebagai kritik terhadap praktik demokrasi Orde Baru yang hanya melandaskan praktik politik kepada berdirinya institusionalisme ; trias politica, UU, dan pemilu, sementara keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat dst yang menjadi elemen substantif dari demokratisasi tidak terlaksana, bahkan cenderung mengalami pembungkaman. Sebagai wujud keprihatinan atas realitas politik yang terjadi pada saat itu, KH. Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan membentuk sebuah forum yang dinamakannya sebagai Forum Demokrasi. Menurutnya, forum ini dibentuk masebagai upaya menumbuhkan perilaku demokrasi yang lebih penting dari lembaga demokrasi. Sementara demokrasi itu sendiri, menurutnya, memiliki komponen yang sangat luas dan itu merupakan komponen yang dicita-citakan Forum Demokrasi, yakni tegaknya kedaulatan hukum, perlakuan yang sama di depan undang-undang, kebebasan berpendapat; kebebasan berserikat, sikap saling hormat dan menghargai antara golongan yang berbeda-beda, serta terbukanya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa ini melalui jalan yang dipilih masing-masing.¹²

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum, yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial. Kemudian Islam secara eksplisit mengajarkan manusia menegakkan keadilan, kebebasan, dan toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin ummat Islam adalah wajib menurut Ijmak ulama. Abdurrahman Wahid dalam melakukan perjuangannya menegakkan demokrasi, pluralisme, dan pembelaan hak-hak minoritas lebih bersifat kultural dan tanpa kekerasan, semua itu dipengaruhi oleh proses pendidikan serta latar belakang kehidupannya yang sunni-tradisionalis dengan

¹²Abdurrahman Wahid dkk, “*bentuk Forum Demokrasi*”, (kompas,1999), 5.

menekankan pada metodologi (manhaj), teori hukum (usul al fiqh) dan kaidah-kaidah hukum (qowaid fiqhiah) dalam kerangka pembuatan suatu sentesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual. Memahami pemikiran dan gagasannya merupakan kajian yang sangat menarik, terlepas dari persoalan di atas, ia merupakan sosok intelektual yang secara serius menekuni berbagai bacaan yang dianggap berat sekalipun. Bacaan yang mendalam atas berbagai karya pemikir-pemikir besar adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan intelektualitasnya. Di samping itu pula, ia merupakan sosok yang mengagumi jiwa kebangsaan para pejuang kemerdekaan Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid menulis, “Dalam politik saya mengagumi Bung Karno untuk semangat kebangsaannya, kecintaannya kepada bangsa ini begitu kelihatan. Bung Hatta saya kagumi untuk sikap demokratisnya, dia betul-betul seorang demokrat, kompeten, kemampuannya tinggi. Syahrir untuk pandangannya yang jauh ke depan. Agus Salim, Tan Malaka dengan kerakyatannya. Dia tidak mengenal putus asa untuk memperjuangkan rakyat.”¹³

Berdasarkan pembahasan di atas, mampu memberikan analisis-analisis terhadap berbagai problem sosial politik dan keagamaan secara rasional dan cerdas. Atas dasar inilah skripsi ini disusun, yakni untuk mengetahui sejauh mana ide atau gagasan demokrasi Islam yang dilontarkan KH. Abdurrahman Wahid.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan permasalahan utama yang menjadi perhatian pada penelitian. Penetapan dan penekanan penelitian adalah tahap yang sangat penting pada penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan pada penelitian kualitatif tidak dimulai berdasarkan sesuatu yang kosong atau tanpa adanya perkara, baik perkara-perkara yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. Jadi penekanan berdasarkan penelitian kualitatif sebenarnya merupakan perkara inti sendiri.

Penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan pada Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi dalam Islam yang meliputi: Pandangan tentang politik dan

¹³Abdurrahman Wahid, “*Tabayun Gus Dur; Pribumisasi Islam Hak minoritas Reformasi Kultural*”, (Yogyakarta: LKis 1998), 166.

demokrasi Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid serta faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi.

C. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang diatas, maka penulisan mendapati terdapat beberapa masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Islam?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “ Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi dalam Islam”:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Islam
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemikiran politik KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik serupa dengan mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan guna penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi dalam Islam.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang membahas tentang pemikiran tokoh agar memperbanyak buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti dan pengumpulan data primer dan sekunder seperti buku-buku karya asli KH. Abdurrahman Wahid dan buku-

buku pendukung yang bersangkutan dengan pembahasan ini yang juga sebagian belum dimiliki penulis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri berdasarkan tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub bab. Sistematika pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian Isi terdiri atas tiga bab, yaitu bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat latar belakang pembahasan mengenai demokrasi dalam pandangan K. H. Abdurrahman Wahid serta signifikansinya terhadap khazanah pemikiran yang telah ada, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai demokrasi sebagai kerangka teori dalam sebuah pemahaman yang meliputi: pengertian, batasan dan parameter demokrasi, demokrasi antara idea dan realitas serta beberapa bentuk demokarsi. Penjelasan ini penyusun anggap perlu untuk mengetahui apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam demokrasi.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian serta pembahsan terhadap Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi dalam Islam.
- BAB V : Penutup
Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, dan Saran-Saran.
3. Bagian Akhir
Pada bab ini berisikan, Daftar Pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah dan lampiran-lampiran.

